

PEMERINTAH KBB MENGAJUKAN PINJAMAN Rp324 MILIAR



waiu71.blogs[pot.com

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Pemerintah KBB) berencana melakukan pinjaman dana kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI Persero) sebesar Rp324 Miliar untuk tahun 2020 mendatang, dimana tinggal menunggu keputusan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) KBB, Asep Wahyu membenarkan, saat ini keputusan pinjaman dana untuk pembangunan infrastruktur jalan tersebut tinggal menunggu persetujuan Kemendagri.

PT SMI sendiri sudah melakukan studi kelayakan untuk mengetahui kemampuan dalam pembayaran serta kondisi keuangan yang dimiliki Pemerintah KBB. Dari hasil studi kelayakan dan penghitungan tersebut, kata Asep, KBB memungkinkan serta layak mendapatkan bantuan pinjaman dana karena dinilai sanggup untuk membayar cicilan. Selain itu, penggunaannya juga dianggap jelas.

Dana pinjaman tersebut tidak dicairkan sekaligus dengan total Rp324 Miliar. Kucuran pinjaman nantinya akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan penggunaan untuk pengerjaan jalan. “Sesuai rencana pembangunan, dana tersebut akan dilakukan untuk perluasan jalan, mulai dari Cihampelas, Gununghalu dan Rongga. Selanjutnya, Rancapanggung (Cililin)-Saguling, terakhir Cisomang-Kadudampit (Cikalong Wetan),” terang Asep.

Untuk diketahui, PT SMI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur. Didirikan pada 26 Februari 2009 sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh modal sahamnya dimiliki oleh negara melalui Kementerian Keuangan.

Pemerintah KBB sendiri memutuskan mengajukan pinjaman guna pembangunan jalan sepanjang 80 kilometer di wilayah selatan serta sebagian wilayah barat KBB. Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna menyatakan, keputusan untuk mengajukan pinjaman ke PT SMI sudah dipikirkan secara matang. Tujuannya agar pembangunan di KBB berjalan cepat. Menurut Aa, meminjam dana ke perusahaan di bawah Kementerian Keuangan ini tidak akan membebani APBD, lantaran bunganya kecil sekitar 10 persen.

Sumber Berita:

1. Galamedia, *Tunggu Keputusan Kemendagri*, Selasa, 03 September 2019, hal. 06;
2. Radar Bandung, *Ajukan Pinjaman Rp324 Miliar*, Selasa, 03 September 2019, hal.02.

Catatan:

1. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. (Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah);
2. Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah. (Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah);
3. Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. (Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah);
4. Pinjaman Daerah bersumber dari :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. Lembaga keuangan bank;
 - d. Lembaga keuangan bukan bank; dan
 - e. Masyarakat.

(Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah);

5. Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan modal negara untuk pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang pembiayaan infrastruktur, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Persero. (Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur);
6. Maksud dan tujuan penyertaan modal negara untuk pendirian Persero sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah mendorong percepatan penyediaan pembiayaan infrastruktur melalui kemitraan dengan pihak swasta dan/atau lembaga keuangan multilateral. (Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur);